

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pemerintah yang baik dan bersih atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi,transparansi, dan akuntabilitas. Jalanya pemerintahan harus dilaksanakan secara transparant dan pelaksanaan pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Mahsun, dkk (2012:20) “*Good governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan secara efektif dan efisien “

Agar dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah, sudah diawali dengan keluarnya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menegaskan bahwasannya tekad bangsa Indonesia untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berdasar pada Undang-Undang No 28 Tahun 1999 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Indonesia yang baik.

Dan sebagai tindak lanjutnya TAP MPR dan Undang-Undang diatas, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden ini mewajibkan semua instansi pemerintah adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara agar mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh setiap instansi tersebut.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan pelaksanaan misi organisasi dalam periode tertentu apakah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yang dimana akan di buat dan disusun dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kerjanya yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mempelajari prosedur penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan melakukan kegiatan magang di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat dengan judul ;  
**“PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OLEH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI SUMATERA BARAT”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam proses Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya dalam Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pprovinsi Sumatera Barat?

### **I.3 Tujuan Magang**

Adapun tujuan magang ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat.

### **I.4 Manfaat Magang**

1. Memberikan pengalaman praktis lapangan kepada mahasiswa dengan ikut serta sehari-hari sebagai integral organisasi dalam dinas pemerintahan, serta dapat mengaplikasikan dalam kegiatan di masyarakat.
2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja, baik dalam hal konsep keilmuannya maupun aplikasi praktisnya. Sehingga nantinya dengan mudah beradaptasi dengan dunia kerja yang nyata.

### **I.5 Tempat, Waktu dan Kegiatan Magang**

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja yang dimulai tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan selesai.

### **I.6 Sistematika Tugas Akhir**

BAB I : Merupakan Bab yang berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Bab yang berisi landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai pengertian akuntabilitas, kinerja, syarat-syarat akuntabilitas, penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP), penanggungjawab penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP).

BAB III : Adalah gambaran umum. Dalam bab ini berisi tentang uraian gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas dan fungsi serta kewenangannya.

BAB IV : Adalah pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang kajian lebih mendalam dari hasil pembahasan masalah yang ditemukan.

BAB V : Adalah penutup. dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

